

Polemik Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan

Cellia Calysta, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: celliac.c.isip20@mail.umy.ac.id

Abstract

The distribution of Social Assistance Funds in Indonesia has always been an absolute legal problem, especially during the current Pandemic. The policy carried out by the government in the distribution of Social Assistance has had a major influence on the community due to the existence of a government policy that implements the Lockdown or PSBB system to reduce the spread of the Covid-19 virus. We see that not a few Indonesians especially Provinces Sumatera Selatan work as online motorcycle taxis, traders, and other odd jobs who have middle to lower incomes. Therefore, the government should facilitate or provide social assistance to communities affected by the Lockdown or PSBB that has been implemented. The government must also pay attention to the price of affordable food needs, especially for people with low income. In this article, I try to explain a little about the pandemic that occurred in South Sumatra Province, whether it has been evenly distributed or not. This research uses qualitative methods with descriptive techniques and data collection through literature studies. The results of this study indicate that the distribution of social assistance has not been implemented properly and evenly. The impact of this polemic is the existence of injustice to the middle and lower class of society.

Keywords: Bansos, Covid-19, PSBB

Abstrak

Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Indonesia selalu menjadi masalah hukum yang mutlak terjadi, terutama di masa Pandemi saat ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyaluran Bantuan Sosial ini memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat akibat dari adanya kebijakan pemerintah yang melakukan sistem PSBB guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini. Bisa dilihat bahwa tak sedikit penduduk Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang berprofesi sebagai ojek online, pedagang, dan pekerja serabutan lainnya yang memiliki penghasilan menengah kebawah. Dalam penelitian ini membahas masalah terkait Penyaluran Bantuan Sosial di masa Pandemi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Teknik Deskriptif dan pengumpulan data melalui Studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran bantuan sosial ini belum terlaksana secara merata dan dampak yang ditimbulkan dari masalah ini, adanya ketidakadilan terhadap masyarakat golongan menengah kebawah.

Kata kunci: Bansos, Covid-19, PSBB

PENDAHULUAN

Covid-19 ialah virus menular berbahaya yang dapat menyerang sistem tubuh manusia. Virus corona ini ditemukan pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, China (Yasmin, 2020). Virus ini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh belahan dunia hanya hitungan bulan. Pada awal kemunculannya, beredar kabar bahwa virus corona SARS Covid-

19 berasal dari tubuh hewan Kelelawar (Yasmin, 2020). Namun, beredar pula kabar bahwa virus ini merupakan hasil buatan manusia. Terdapat cecok antar negara Adidaya yaitu Amerika Serikat dan China yang saling tunjuk perihal asal – usul virus corona ini. Donald Trump, Presiden USA menyatakan virus Covid-19 dari negara China. Sementara dari pihak Chinna tidak setuju, akhirnya juru bicara Kementrian Luar Negeri China, Zhao

Lijian menyatakan, yang membawa virus tersebut ke Wuhan China adalah tentara Amerika (Nafilah, 2020).

Semenjak virus Covid-19 ini menyebar ke seluruh belahan dunia, ada beberapa negara yang dengan sigap membuat kebijakan dalam menangani virus Covid-19 ini. Seperti Spanyol, Prancis, Italia, Malaysia dan masih banyak lagi negara lain yang menerapkan sistem Lockdown guna mencegah meluasnya virus Covid-19 (Khoiriyah *et al.*, 2020). Di Indonesia sendiri, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat pemerintah dan dijalankan di beberapa daerah yang terdampak Covid-19 yang cukup parah. PSBB merupakan kegiatan penduduk yang dibataskan pada waktu tertentu di area suatu daerah yang terpapar oleh virus Covid-19 ini (Detikcom, 2020).

Namun, sudah lebih dari 1 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan telah berbagai upaya dilakukan untuk menangani virus ini dan hasilnya tetap nihil. Hingga kini, virus Covid-19 ini makin tersebar luas di Indonesia. Terhitung jumlah kasus yang terkonfirmasi pun tak kunjung menurun sejak pertama kali virus ini diumumkan. Kenaikan kasus positif tiap hari semakin meningkat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kehidupan dan kondisi perekonomian masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat yang terbatas karena adanya pemberlakuan PSBB membuat pemasukan keuangan berkurang sehingga menurunnya ketahanan pangan pada masyarakat (Teja, 2020).

Tercatat hingga saat ini, pasien yang terpapar corona terus bertambah. Sampai hari Rabu (28/3/21) terdapat penambahan pasien yang positif terpapar corona berjumlah 4.656 pasien, hingga seluruh total pasien positif corona menyentuh angka 1.651.794. Tak sedikit juga pasien yang meninggal akibat Covid-19 ini. Sampai saat ini, pasien yang meninggal akibat corona mencapai 168 orang. Jumlah keseluruhan pasien yang meninggal akibat Corona menembus angka 44.939. Pasien yang sudah sembuh bertambah sebanyak 4.884

orang. Total akumulatif pasien yang sudah sembuh menjadi 1.348.330 orang. Sedangkan kasus suspek Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 65.911 orang. Dengan menambahnya kasus positif setiap hari, membuat pihak rumah sakit kewalahan dalam menangani pasiennya. Semakin hari pasokan alat medis semakin berkurang karena jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah jumlahnya (Herlina Kartika Dewi, 2020).

Pandemi Covid-19 mengacu pada dimensi ketahanan perekonomian rakyat Indonesia, tabungan dan kekuatan simpanan uang keluarga yang di hemat – hemat ini harus mampu bertahan selama pandemi. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah yakni PSBB, membuat masyarakat kewalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasalnya, mereka bekerja tidak seperti biasanya, yang dulu bekerja langsung ditempat sekarang menjadi via online. Berkerja dari rumah, banyak sekali menuntut pengeluaran seperti pembekalan kuota dan listrik (Teja, 2020). Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Th 2018 tentang karantina kesehatan dan kebijakan PSBB terdiri dari liburanya tempat sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan kegiatan keagamaan yang merujuk pada penanganan virus corona tersebut (Teja, 2020).

Sejalan dengan menyebarnya Covid-19 di Indonesia terjadi banyak sekali perubahan pada pola hidup yang terjadi di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya virus ini bagi negara indonesia sangat banyak. Contohnya saja perekonomian Indonesia jatuh, hutang negara meningkat dan pola hidup masyarakat sangat berbeda dibanding sebelum corona menyerang Indonesia. Seluruh kegiatan yang biasa dilakukan secara normal, sekarang terhambat dan berbeda akibat munculnya virus corona ini. (Mufida, 2020).

Ditengah masa pandemi saat ini, pelayanan publik harus lebih ditingkatkan karena ini

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona. Dalam pelayanan publik, penyelenggara layanan wajib meningkatkan mutu kualitas pelayanan di situasi pandemi saat ini, diantaranya :

1. Penyelenggara menyediakan sumber informasi dengan baik terkait standar pelayanan.
2. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan dengan baik secara online
3. Harus ada adaptasi terhadap sarana dan prasarana
4. Meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan

Pelayanan publik dimasa pandemi ini seperti sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat dan harus ditepati oleh Pemerintah. Meskipun dimasa pandemi saat ini, pelayanan publik harus tetap dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan standar mutu pelayanan publik demi mencegah virus corona menyebar luas (Tismayuni, 2020).

METODE PENELITIAN

Pada Artikel ini metode yang dipakai ialah metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilaksanakan berdasarkan kehidupan nyata dengan fokus untuk meneliti bagaimana fenomena itu dapat terjadi (Yoni Ardianto, 2019). Teknik deskriptif juga merupakan prosedur atau langkah yang digunakan untuk menginvestigasi dan menampilkan gambar subjek atau objek penelitian seperti lembaga, kelompok, masyarakat dan individu berdasarkan fakta dan gambaran yang tertulis (Yoni Ardianto, 2019). Artikel ini mengambil sumber yang berasal dari studi pustaka untuk memberi gambaran mengenai polemik bantuan sosial di masa pandemi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Penulis

mengumpulkan data terkait dari berbagai sudut pandang yang memiliki keterkaitan pada fokus penelitian seperti jurnal, buku, dokumen dan berita yang sumbernya sudah kredibel.

Sebagai fokus dari penelitian, maka penulis akan menulis artikel ini dengan fokus untuk memberikan gambaran mengenai pemberian bansos Covid-19 di wilayah Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya pemerintah mengeluarkan peraturan dan tidak sejalan dengan pemikiran gaya hidup rakyat Indonesia, mengakibatkan timbulnya masalah baru ditengah situasi pandemi saat ini. Telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagian sudah berjalan dengan baik namun ada pula yang tidak berjalan dengan semestinya. Seperti bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata – rata banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Banyak kekeliruan yang terjadi akibat salah melengkapi data. Akibatnya, bansos yang diberikan tidak sesuai jumlahnya (Shinta, 2020).

PROGRAM BANSOS DARI PEMERINTAH INDONESIA

Kementerian Sosial Indonesia menyatakan bahwa Bantuan Sosial ialah jenis bantuan yang bersifat sementara dan ditujukan kepada warga menengah kebawah guna mencukupi kehidupannya secara wajar (Kartawidjaja, 2020). Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani kasus virus corona ini, pemerintah sepakat menetapkan kebijakan bahwa virus Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional artinya bencana ini sudah menjalar dan sulit ditangani. Hal itu yang di usul lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 th 2020 mengenai penetapan bencana non alam. Corona virus ini telah di nobatkan sebagai bencana non alam yang mengancam ketahanan negara Indonesia. Pemberlakuan kebijakan PSBB bagi

yang wilayah atau daerahnya yang sudah terdaftar pada kawasan zona merah melalui Permenkes No. 9 Th. 2020 mengenai pedoman program PSBB. (Kartawidjaja, 2020).

Program Bantuan Sosial ini dibuat karena program bentuk jaminan sosial yang terbentuk dari rasa tanggung jawab pemerintah tentang pentingnya keberlangsungan hidup warga yang kondisi perekonomiannya terancam. Berbagai bentuk bantuan sosial yang dibuat pemerintah akan diberikan kepada masyarakat berupa bantuan subsidi. Namun, di beberapa daerah bantuan subsidi yang dimaksud masih berupa barang. Bansos yang telah di siapkan pemerintah untuk membantu ekonomi warga menengah kebawah ini akhirnya dibentuk program yang terdiri dari beberapa macam berupa uang, modal UMKM, sembako hingga diskon biaya tarif listrik yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah menobatkan program ini program yang bisa dijalankan secara efektif dalam meminimalisir angka kemiskinan yang melanda masyarakat (Mufida, 2020).

Berbagai macam keragaman program yang dibentuk oleh pemerintah guna membantu masyarakat yang kurang mampu dimasa pandemi saat ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Di sisi lain, terdapat banyak aspek pembangunan manusia yang dinahkodai oleh berbagai program tersebut. Ditambah lagi, semua program telah memiliki kelengkapan umum untuk dijalankan, seleksi penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Di satu sisi, pengolaan program pelayanan bantuan sosial memiliki variasi yang cukup kompleks dan terdapat perbedaan data yang menjadi tantangan pada pelaksanaan program yang dapat berpengaruh pada ke efektifan program pemerintah tersebut (Watch, 2020)

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri disebutkan bahwa APBD perlu di prioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi

adanya akibat yang ditimbulkan dari transmisi Covid-19 terkhusus bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemberian bansos yang dilakukan pemerintah ini merupakan program lama yang ada sejak dulu. Seperti pada kondisi dimana terdapat bencana di daerah tertentu, program pemerintah dalam pemberian bansos ini selalu dilkaukan oleh pemerintah pusat maupun daerah namun masyarakat selalu menganggap kurang akibatnya banyak menimbulkan kekecewaan dalam penyalurannya. (Watch, 2020)

Karena permasalahan sosial kesejahteraan yang sedang berkembang saat ini menampilkan bahwa terdapat masyarakat yang hak kebutuhan dasarnya belum terpenuhi seutuhnya. Maka, dari situlah timbul akibat yang membuat warga mendapat hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial hingga masyarakat susah mendapati kehidupan yang layak dan baik. Kesejahteraan Sosial merupakan sistem yang terorganisir teratur, terpadu dan sistem yang berkelanjutan dari upaya yang dilakukan pemerintah guna memenuhi standar kehidupan masyarakat yang terdiri dari jaminan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan sosial (Kartawidjaja, 2020).

BENTUK BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI SUMATERA SELATAN

Semenjak Pandemi Covid-19 ini muncul dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, telah banyak bentuk bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Program pemerintah bantuan sosial ini sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup mereka yang terdampak dari adanya virus Covid-19 ini. Terdapat 3 macam bentuk bantuan sosial yang penyalurannya ditujukan ke KPM yaitu, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan berupa barang Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) . Mirwansyah kepala dinsos Palembang mengatakan, ada sekitar 1.106.949 KPM

penenerima bansos pada program Kementerian Sosial. Perkiraan bantuan sosial yang akan diberikan pada warga secara berurutan di tahun ini berupa Bantuan Sosial uang tunai bagi 131.663 KPS sejumlah Rp. 300.000 selama 4 bulan berturut-turut. Lalu jenis bantuan sosial yang berupa PKH disalurkan kepada 328.570 KPM dan bantuan sosial berupa sembako bagi 646.716 KPM (Dinas *et al.*, 2021).

Bantuan sosial yang disalurkan ini berupa uang yang penyalurannya dibantu bank negara serta PT Pos Indonesia yang bisa dipercaya pemerintah untuk mendistribusikan bantuan tersebut secara baik hingga jatuh ke tangan KPM. Begitupun dengan bantuan sosial yang berupa sembako disalurkan melalui Perusahaan Bulog yang telah berjalan baik hingga sekarang. Daripada itu, pemerintah juga mengerahkan banyak personil untuk melakukan pengawasan terhadap 3 jenis bantuan sosial tersebut agar tersalurkan secara transparan tanpa adanya pajak, sampai tujuan dan tiba sesuai sasaran, pihak Bulog juga mengharapkan adanya keikutsertaan dari berbagai belah pihak dan masyarakat untuk memberi tahu pada pihak yang bersangkutan bila ternyata terbukti ada kesalahan terhadap bantuan sosial yang disalurkan tersebut (Susanto, 2021).

Sebanyak 1.106-949 KPM di Provinsi Sumatera Selatan yang menerima bantuan sosial berupa uang tunai program Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Di Sumatera Selatan sendiri, penyerahan dana bantuan sosial berupa uang tunai tersebut digelar secara simbolis oleh Gubernur H. Herman Deru di Auditorium Bina Praja, Palembang pada hari Senin tanggal 1 bulan April 2021. Penyerahan dana bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial, Tri Rismaharini melalui siaran virtual Istana Presiden. Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan bahwa beliau akan memastikan pendistribusian bantuan sosial

yang berupa uang tunai yang akan dilaksanakan serentak nasional itu tidak akan terhambat. Sekalipun jika terdapat data yang tidak tepat dalam proses penyaluran, pihak distributor yang bertanggung jawab dalam penyaluran tersebut harus bergerak cepat. Dengan melakukan screening ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Sumsel (2021, 2021).

FLEKSIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI

Pelayanan bansos yang fleksibel sangat diharapkan pemerintah di masa pandemi sekarang. Pelayanan bansos yang fleksibel ini ditentukan oleh penerapan dari prinsip subsidiaritas yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan sosial. Prinsip Subsidiaritas sebenarnya telah digunakan pada program penyelenggaraan Pemerintah Desa (UU Nomor 6/2014). Pengertian Subsidiaritas ialah kewenangan dan keputusan yang ditetapkan pada tingkat desa guna kemakmuran warga di desa. Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk mengatasi kelambatan dan kekakuan birokrasi dalam pelayanan bantuan Sosial Covid-19 (Ola Mangu Kanisius, 2020).

Guna memastikan pelayanan bantuan sosial tersebut tepat pada sasaran, pendataan jumlah keluarga penerima bantuan sosial, masyarakat wajib mengikuti pola yang ditetapkan des/kelurahan terkait sistem penerima BLT dana desa. Apabila yang menerima bantuan sosial belum mempunyai dokumen kependudukan, maka, pejabat desa wajib mengeluarkan surat tentang keterangan berdomisili untuk meyakinkan bahwa penerima bansos tersebut warganya. Pelayanan publik yang fleksibel dapat berjalan dengan baik apabila prinsip akuntabilitasnya berjalan sesuai prosedur yang ada, sehingga membuat publik ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan bantuan sosial ini selama pandemi (Ola Mangu Kanisius, 2020).

KASUS TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DI SUMATERA SELATAN

Presiden Joko Widodo meminta kepada panitia yang mengola dan mendata para anggota keluarga penerima bantuan sosial harus di publikasikan secara terang – terangan guna terhindar dari kabar miring dan kecurigaan, pasalnya sejak awal di programnya bantuan sosial dimasa pandemi ini data penerima bansos banyak yang tidak sesuai atau valid yang menimbulkan kerugian dan kekacauan. Contohnya di kota Palembang, pasukan ketua RT di berbagai kelurahan telah melaporkan pada Dinsos Palembang dari bulan lalu mengenai data warga penerima bantuan sosial tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang bansos yang diharapkan warga daerah setempat sejak awal program itu dibuat tak ada jawaban. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang , Heri Aprian mengatakan bahwa program bantuan sosial yang akan disalurkan sekarang belum juga tersebar secara merata di daerah Palembang (Feny Maulia Agustin, no date a).

Terdapat banyak laporan dari para ketua dari masing – masing kelurahan bahwa terdapat 40.000 masyarakat menengah kebawah yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Tetapi, jumlah data yang terdata saja masih belum seluruhnya tersalurkan. Belum sampai 2 pekan, data penerima bansos ini bertambah 9.000 KK. Dari yang semula 40.000 menjadi 49.669 KK. Penambahan data penerimaan bansos warga miskin baru ini cukup mengagetkan. Karena jumlah data yang bertambah ini belum termasuk kedalam 3 program anggaran bantuan sosial pemerintah. Hingga saat ini, tercatat jumlah keseluruhan warga yang perekonomiannya di bawah rata - rata berada di kota Palembang menyentuh angka 115.000 KK, tetapi hanya 65.000 KK yang tercatat dan terprogram dalam data penerimaan bansos dari pemerintah. Selebihnya 49.669 KK yang dinyatakan kedalam data warga miskin baru

belum tercatat di kategori penerima bansos pemerintah (Feny Maulia Agustin, no date a)



Sumber :

<https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/feny-agustin/lipsus-mengungkapkan-transparansi-data-penerima-bansos-palembang>

Ratu Dewa selaku Sekretaris kota Palembang tengah memantau sembako yang akan disalurkan kepada warga miskin di Palembang. Satu kantong tas sembako dari Pemerintah Palembang itu berisi 2kg gula pasir, 10kg beras, 2kg minyak goreng dan 1kg tepung terigu. Sembako tersebut diberikan sebulan 2 kali atau tiap 15 hari sekali berdasarkan data awal yang disalurkan ke kecamatan yang terdata dan diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat yang dibantu anggota TNI, Polri dan Babinsa. Anggaran dana yang disiapkan Pemkot Palembang untuk dana bansos ini senilai Rp54 miliar hanya untuk paket sembako. Dari anggaran dana berjumlah 200 milyar yang digunakan untuk menangani Covid-19 ini dipangkas untuk paket sembako sejumlah 54 milyar yang akan diberikan kepada 49.000 KK yang berada di 18 kecamatan di Palembang (Feny Maulia Agustin, no date a).

KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI SUMATERA SELATAN

Baru – baru ini, Kepala Desa Sukowarno Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Askari melakukan tindakan yang sangat merugikan dan memalukan. Pasalnya Askari menyelewangkan dana bansos Covid-19 tersebut untuk main judi, main perempuan dan juga membayar hutang. Askari dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Perbuatan yang dilakukan Kepala Desa tersebut yang dapat memperlambat program yang dibuat oleh pemerintah terkait pemberantasan korupsi dan penanganan yang terfokus pada kasus Covid-19 yang dampaknya akan merugikan negara. Kepala Desa Sukowarno tersebut diduga telah menggelapkan uang tunai 187 juta yang merupakan dana dari BLT di desa Sukowarno yang dulu masih menjabat sebagai Kepala Desa di Sukowarno. Tujuan ia menggelapkan dana BLT tersebut untuk membayar hutang – hutang yang digadag – gadang menyentuh angka Rp31 juta, Rp 50 juta digunakan untuk main judi remi, Rp5 juta yang dipinjam warga desa Suro, senilai 15 juta dipakai untuk perayaan hari raya Idul Fitri bersama keluarganya, Rp6 jt membayar hutang – hutang ke warganya dan Rp70 juta digunakan untuk berjudi. Akhirnya setelah dilakukan persidangan, terkuak bahwa dana yang digelapkan tersebut sebagiannya digunakan terdakwa untuk melunasi 1 unit mobil yang merupakan digunakan selingkuhannya yang juga termasuk warga Sukowarno. Dalam persidangan tersebut, terdakwa ditetapkan Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Zukanedi, 2021)

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Covid-19 memberi tanda bahwa akan mereda. Kebijakan yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan diterima dengan bijak oleh masyarakat. Setiap hari kenaikan jumlah kasus positif corona terus meningkat sedangkan fasilitas medis yang disediakan semakin berkurang. Di Palembang sendiri, Pemerintahnya membuat 3 bentuk bantuan sosial diantaranya, Bantuan Sembako, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan sosial yang di anggarkan oleh Pemerintah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa data yang tidak valid dan kurang transparansi. Bantuan sosial berupa sembako yang diberikan setiap 15 hari sekali pun sudah lebih dari cukup. Sehingga kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan tercukupi. Namun, masih ada saja pejabat daerah yang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk kepentingan pribadi. Tanpa ada rasa kemanusiaan, mereka menggelapkan dana bantuan tersebut kepentingan pribadi dan foya – foya. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini, pemerintah dengan tegas menangani dan menguatkan hukum untuk pelaku kejahatan seperti itu (Zukanedi, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- 2021, scmidt iotc (2021) 'Data Penerima Bansos', p. 6.
- Detikcom, T. (2020) *Negara yang enerapkan sistem Lockdown*, *Detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona> (Accessed: 29 May 2021).
- Dinas, T. *et al.* (2021) 'Dinsos Sumsel awasi penyaluran tiga jenis bansos', p. 2.
- Feny Maulia Agustin (no date a) '1 .49 ribu KK tidak menerima bansos', pp. 4–6.
- Feny Maulia Agustin (no date b) *Transparansi data bansos*, *sumsel.idntimes.com*.

- Available at: <https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/feny-agustin/lipsus-mengungkapkan-transparansi-data-penerima-bansos-palembang/1> (Accessed: 30 May 2021).
- Herlina Kartika Dewi (2020) *Update Corona Indonesia*, *Kontan.co.id*. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/update-corona-indonesia-jumat285-tambah-5862-kasus-tetap-pakai-masker> (Accessed: 29 May 2021).
- Kartawidjaja, J. (2020) 'Penerimaan Bansos', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), pp. 1–9.
- Khoiriyah, F. *et al.* (2020) 'Keefektifan program pelaksanaan bantuan sosial yang terpapar Covid-19 o The Effectiveness Of The Implementation Of Social Assistance On Communities Affected By Covid-19 In The', *Spirit Publik*, 15, pp. 97–110.
- Mufida, A. (2020) 'Masalah pemberian bansos covid', *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), pp. 159–166.
- Ola Mangu Kanisius (2020) 'Fleksibilitas bansos', *ombudsman.go.id*. Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--akuntabilitas-dan-fleksibilitas-pelayanan-bansos-covid-19>.
- Teja, M. (2020) 'Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19', *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, pp. 13–18.
- Tismayuni, D. A. (2020) *Standar pelayanan publik yang harus diingkatkan*, *@ombudsman.go.id*. Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peningkatan-standar-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi-corona> (Accessed: 29 May 2021).
- Watch, I. C. (2020) 'Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19 Pemantauan Distribusi Bansos', (September).
- Yasmin, P. (2020) *Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya?*, *Detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya> (Accessed: 29 May 2021).
- Yoni Ardianto (2019) 'Memahami Metode Penelitian Kualitatif', *djkn.kemenkeu.go.id*, 7 May. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode Penelitian.>
- Zukanedi, B. (2021) 'Korupsi bansos', p. 2020.